

Karutan Surakarta Penuhi Undangan Evaluasi Nasional Pengadaan Bahan Makanan TA 2026, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Kevin Guntur - SURAKARTA.TELISIKFAKTA.COM

Dec 23, 2025 - 14:08



Dok : Humas Rutan Surakarta



Surakarta — Kepala Rutan Kelas I Surakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel dengan menghadiri kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Makanan (Bama) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Senin (22/12). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan terpusat di Lapas Kelas I Semarang.

Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Turut hadir pula secara langsung maupun daring Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta para vendor penyedia bahan makanan, sebagai bagian dari penguatan sinergi dan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan.

Dalam arahannya, Dirjen Pemasyarakatan menekankan pentingnya kesiapan sejak dini dalam pelaksanaan pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2026, khususnya melalui mekanisme e-purchasing. Evaluasi dan pembinaan ini menjadi sarana penyelarasan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di tingkat satuan kerja, sekaligus memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Rutan Kelas I Surakarta dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan nyata terhadap pengelolaan bahan makanan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, partisipasi aktif Karutan Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan tersebut menjadi langkah strategis dalam menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, serta memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas I Surakarta, semakin siap melaksanakan pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, tepat mutu, dan

sesuai regulasi, demi pemenuhan hak dasar Warga Binaan secara berkelanjutan.